



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 85 TAHUN 2026

TENTANG
PEJABAT PELAKSANA KELAS 7 (TUJUH) SEBAGAI KETUA TIM KERJA
YANG MENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PRESTASI KERJA TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah, perlu menetapkan pejabat pelaksana kelas 7 (tujuh) sebagai ketua tim kerja yang menerima tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pejabat Pelaksana Kelas 7 (tujuh) sebagai Ketua Tim Kerja yang Menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 186);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2026 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEJABAT PELAKSANA KELAS 7 (TUJUH) SEBAGAI KETUA TIM KERJA YANG MENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pelaksana Kelas 7 (tujuh) sebagai Ketua Tim Kerja yang Menerima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Kelas 7 (tujuh) sebagai Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
 - d. memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim;
 - e. melaporkan hasil kinerja anggota timnya kepada pejabat penilai kinerja dan pimpinan unit organisasi yang bersangkutan sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja; dan
 - f. melaksanakan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar anggota tim.
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Kelas 7 (tujuh) sebagai Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dievaluasi sesuai kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2025 tentang Penunjukan Jabatan Pelaksana sebagai Ketua Tim Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Januari 2026
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul; dan
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 85 TAHUN 2026
TENTANG
PEJABAT PELAKSANA KELAS 7 (TUJUH)
SEBAGAI KETUA TIM KERJA YANG MENERIMA
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN
PRESTASI KERJA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PEJABAT PELAKSANA KELAS 7 (TUJUH) SEBAGAI KETUA TIM KERJA

No	Nama	NIP	Jabatan	Perangkat Daerah/Unit Organisasi	Tim Kerja	Sasaran	Indikator	Target
1	Irfan Budi Santoso, S.S.T., M.Eng.	19830624200604 1007	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tim Kerja Pelayanan Informasi	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan informasi publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Laporan

2	Jarot Achid Alvian, S.Kom.	19901010201902 1001	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tim Kerja Koordinasi Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Khusus SPBE	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	23 Aplikasi
3	Orchidania Azizah, S.Si.	19980410202203 2009	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Komunikasi dan Informatika	Tim Kerja Pengumpulan Data Satu Data Indonesia	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	80%

4	Fatah Yogo Yudhanti, S.Si.	19921027202203 2008	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tim Kerja Penyusunan Rencana Kontingensi, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana, dan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kontingensi Bencana Kabupaten	Jumlah Dokumen Rencana Kontingensi Kabupaten (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 Dokumen
						Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten yang sah/legal yang dipantau dan dievaluasi	1 Dokumen
						Terlaksananya Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	5 Dokumen

5	Bayu Wicaksana, S.Si.	198901312022031003	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Tim Kerja Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	12 Laporan
6	Kharir Mahrur, S.IP.	198303132010011008	Penelaah Teknis Kebijakan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	Tim Kerja Kewaspadaan Dini	Terlaksananya koordinasi, fasilitasi, dan monitoring kewaspadaan dini daerah	Tingkat stabilitas keamanan dan ketenteraman masyarakat Kabupaten Bantul	1 Laporan
7	Farida Nurlaila, S.Si., M.P.A.	198009232010012012	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Lingkungan Hidup	Tim Kerja Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	129 Kelompok

8	Muhammad Anggeris Wanto, S.E.	199004202020121008	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Tim Kerja Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Pemohon ijin LPK	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	3 Perizinan
					Tim Kerja Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Perusahaan dan UMKM di wilayah Kabupaten Bantul	Jumlah Perusahaan Kecil yang mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan
					Tim Kerja Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	3 Dokumen
9	Atriyusri Hanafah, S.Si.	199212142022032005	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>)	Tim Kerja Pelaksana Pengukuran Tanah Kalurahan	Terlaksananya pengukuran Tanah Kalurahan	Jumlah (Bukti Pembayaran) SPS pengukuran tanah kalurahan	1500 BP (Bukti Pembayaran) SPS pengukuran tanah kalurahan
					Tim Kerja Pelaksana Pematokan Tanah Kalurahan	Terlaksananya pematokan Tanah Kalurahan	Jumlah dokumen pemasangan patok/penanda Tanah Kalurahan	3 Dokumen

					Tim Kerja Pelaksana Verifikasi Tanah Kalurahan Belum Bersertifikat	Terlaksananya Verifikasi Tanah Kalurahan Belum Bersertipikat	Jumlah dokumen Verifikasi Tanah Kalurahan Belum Bersertifikat	3 Dokumen
10	Busrini Agustina Prihatini, S.Psi.	19890130202203 2001	Penelaah Teknis Kebijakan	DP3APPKB	Tim Kerja Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terlaksananya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	900 Orang

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH